RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2025-2029



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyelenggaraan pembangunan derah Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.
Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Sebagai penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat DaerahKabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

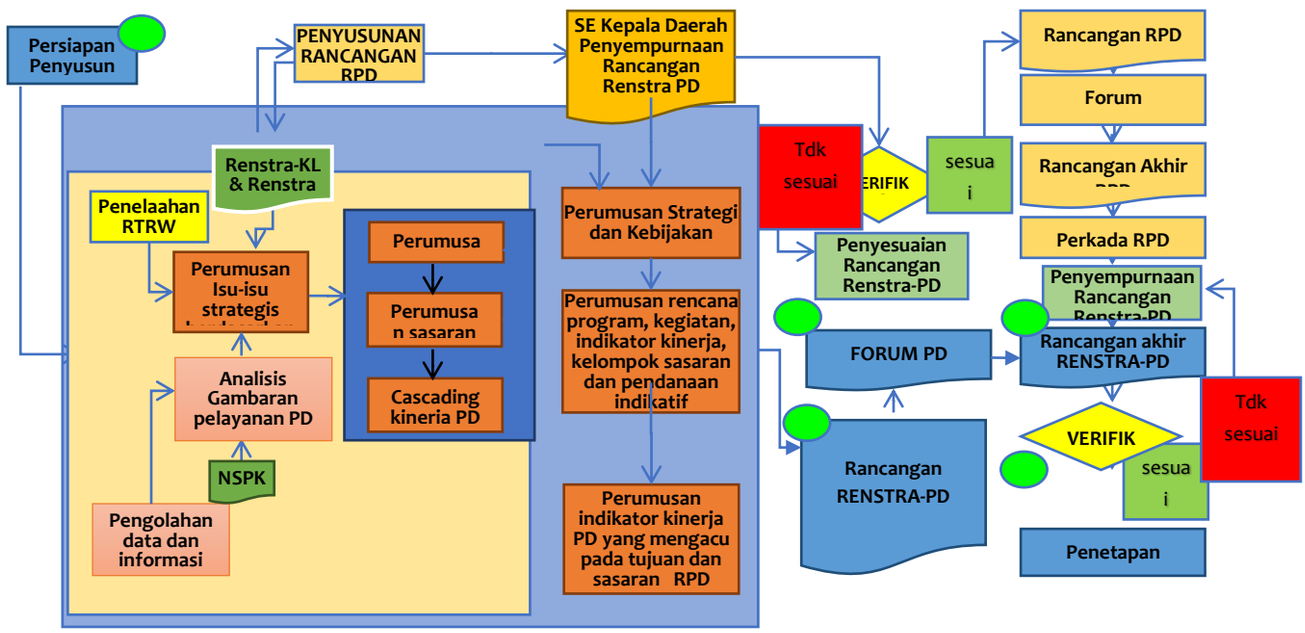
Dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2029; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2029 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)*melalui Forum Perangkat Daerah untuk

menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah termasuk DPRD.

Berkenaan dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk dapat menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang optimal, maka perlu disusun perencanaan strategis agar potensi yang ada dapat memberikan andil besar dalam pembangunan. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada

Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Dinas Kependudukan telah diberi amanat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan, hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan dalam upaya menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan yang baik dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu disusun Rencana Strategis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan rencana kerja lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan tersebut diperlukan berbagai analisis, mempersiapkan semua faktor penunjang serta menciptakan system umpan balik untuk mengetahui efektifitas pencapaian implementasi rencana strategis.

Rencana Strategis OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanginan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah secara sinergis akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah dan acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Kepala Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Pemda dan Organisasi Perangkat Daerah serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Sehubungan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk membuat perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, serta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan, dan disusun sebagai penajaman program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekaligus sebagai pedoman, landasan, dan referensi dalam menetapkan skala prioritas rencana tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang setiap tahun dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Landasan Hukum

Beberapa rujukan yang paling umum dan paling mengikat sebagai dasar hukum penyajian laporan keuangan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029;

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dimaksudkan untuk memberikan arah perencanaan bagi pelaksanaan dalam menjalankan semua program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan agar tercapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dengan merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan tujuan Penyusunan Renstra adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan

bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan; dan
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. Gambaran pelayanan

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
b. Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
c. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
e. Mitra Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Darah

a. Identifikasi Permasalahan;
b. Perumusan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

3.2. Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029;
3.3. Arah Kebijakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;
4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 Gambaran Pelayanan

Pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Adapun perangkat pendukung pelayanan administrasi kependudukan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang datanya terintegrasi dan dikelola secara sentral oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Sebelumnya, setiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di kabupaten/kota memiliki server dan basis data SIAK sendiri. Namun, dengan konsep SIAK terpusat, seluruh data kependudukan penduduk Indonesia disimpan dalam satu basis data tunggal di tingkat nasional. SIAK terpusat merupakan langkah besar dalam modernisasi administrasi kependudukan di Indonesia untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan akuntabel kepada Masyarakat.

Layanan kependudukan dan pencatatan sipil secara online dari pemerintah pusat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 20 (dua puluh) Kecamatan sehingga database dapat di update setiap hari di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan Adminduk juga dilaksanakan Mall Pelayanan Publik (MPP) Nyawiji dan beroperasinya mobil pelayanan jemput Bola layanan Adminduk.

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang dijabarkan dalam

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

TUGAS POKOK

Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan.

FUNGSI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan anggaran;
b. pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara;
d. pengelolaan urusan ASN;
e. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administarsi kependudukan;
f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
h. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
i. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
j. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
k. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
l. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;

n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, terdiri dari:

KEPALA DINAS
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan.

SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. pembinaan aparatur;
e. pengelolaan urusan kepegawaian;
f. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g. fasilitasi pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;
h. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan

di kabupaten/kota;

i. pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
j. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

a) menyiapkan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b) menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran;
c) menyiapkan penyusunan pelaporan kinerja;
d) menyiapkan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
b) melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
c) melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
d) menyiapkan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
e) menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
f) menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Umum dan kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) melaksanakan urusan persuratan;

b) melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d) melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e) melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang – undangan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi, serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk, serta pelaksanaan pendataan penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran, pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status pewarganegaraan dan kematian.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
g. pengendalian dan evaluasi pelaksanan pencatatan sipil;
h. penyiapanpengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

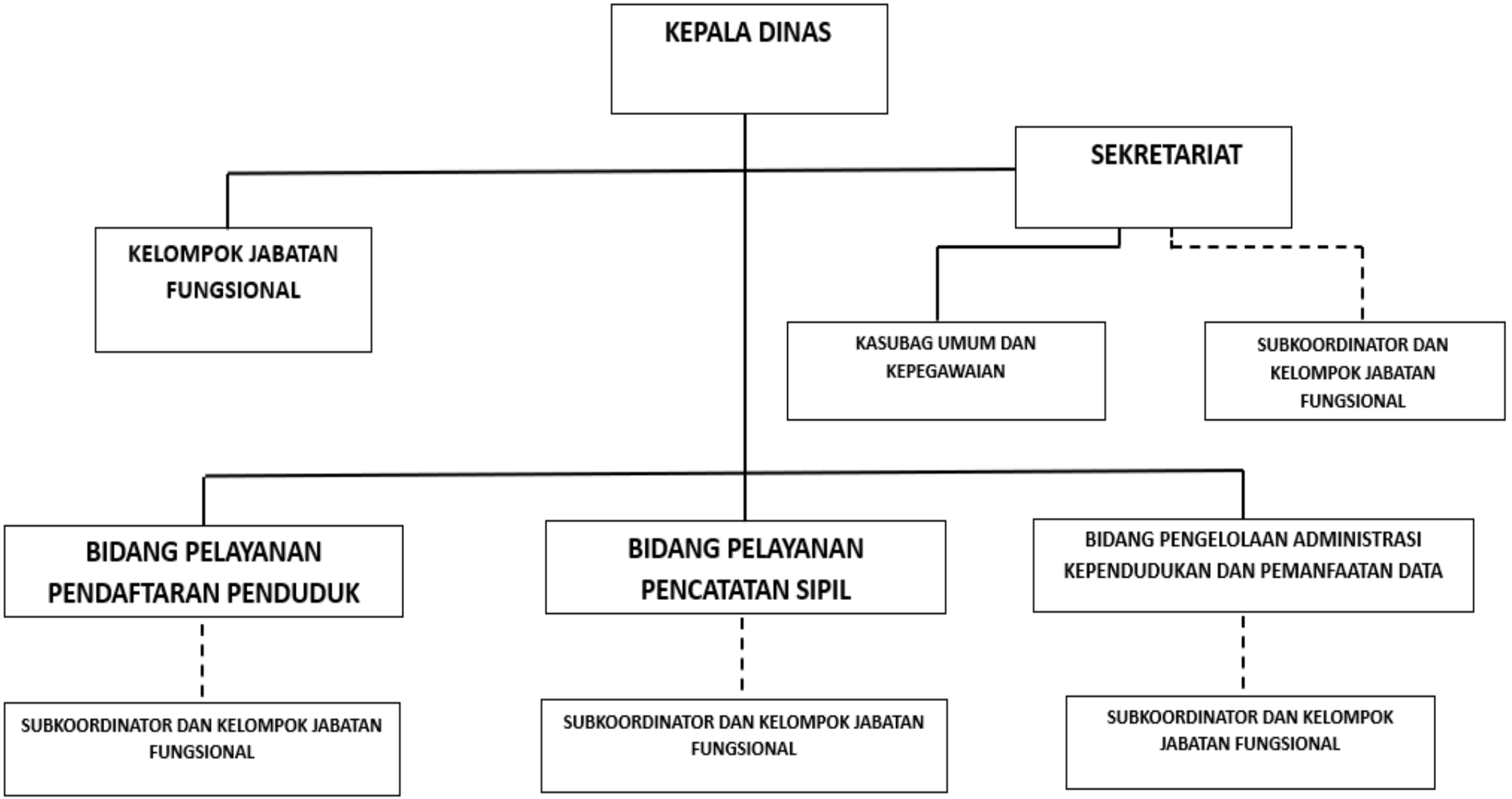
3. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan SIAK, pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan, serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data , mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK



b. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia/aparatur dan asset/modal.

a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 25 orang, terdiri dari 14 orang laki-laki, 11 orang Perempuan dengan komposisi berdasarkan golongan, tingkat pendidikan, sebagaimana tabel berikut :

Distribusi Jumlah Pegawai

Dinas Dukcapil Kabupaten Nganjuk

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	1
4	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1
5	Kabid Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1
6	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	2
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
8	Pengelola Barang Milik Negara	1
9	Bendahara	1
10	Pengelola (SIAK) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	5
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
12	Pengelola Keuangan	1
13	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	1
14	Pengadministrasi Kependudukan	2

15	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	1
16	Pramu Kebersihan	1
17	Perencana Ahli Pertama	1
18	Operator SIAK Terampil	1

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dukcapil April 2025

Sedangkan Jumlah jumlah Pegawai berdasarkan golongan dan eselon maupun jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan latar belakang ilmunya sebagai berikut:

Data pegawai berdasarkan golongan dan eselon

NO	GOLONGAN	JUMLAH GOLONGAN	ESELON			
			I	II	III	IV
1	IV/b – IV/c	2	-	1	1	-
2	IVa	4	-	-	3	-
3	III/d	8	-	-	-	3
4	III/c	-	-	-	-	-
5	III/b	2	-	-	-	-
6	III/a	2	-	-	-	-
7	II/d	3	-	-	-	-
8	II/c	1	-	-	-	-
9	II/b		-	-	-	-
10	II/a	1	-	-	-	-
11	IX PPPK	1	-	-	-	-
12	VII PPPK	1	-	-	-	-
	JUMLAH	25	-	1	4	3

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dukcapil April 2025`

NO	JURUSAN PENDIDIKAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		SD	SMP	SMA	SMK	D3	S1	S2	
1	Ilmu Administrasi Negara	-	-	-	-	-	2	1	
2	Pemasaran	-	-	-	-	-	-	1	

NO	JURUSAN PENDIDIKAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		SD	SMP	SMA	SMK	D3	S1	S2	
3	Administrasi Negara	-	-	-	-	-	4	2	
4	Ekonomi Manajemen	-	-	-	-	-	2	-	
5	Ekonomi Akuntansi	-	-	-	-	-	1	-	
6	Teknik Elektro	-	-	-	-	-	1	-	
7	Ilmu Hukum	-	-	-	-	-	1	-	
8	Ilmu administrasi bisnis	-	-	-	-	-	2	-	
9	Managemen Informatika	-	-	-	-	1	-	-	
10	Teknik informatika	-	-	-	-	1	-	-	
11	Teknik Komputer	-	-	-	-	1	-	-	
12	Keuangan	-	-	-	1	-	-	-	
13	IPS	-	-	3	-	-	-	-	
14	Ekonomi Syariah	-	-	-	-	-	1	-	
15	SMP	-	1	-	-	-	-	-	
16	SD	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	-	1	3	1	3	14	4	

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dukcapil April 2025

Dari 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada, sebagian besar atau 56% merupakan PNS dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1), kemudian PNS dengan Pendidikan (S2) Magister sebesar 16% disusul PNS yang berpendidikan SMA/K atau 12 %, dan Diploma III sebesar 12% kemudian untuk mencukupi kekurangan PNS yang dikarenakan pensiun dan mutasi tercatat ada 35 Tenaga harian sebagai Keamanan,

Pramubakti, Pengemudi, operator SIAK, Pengadministrasi Perkantoran, pengelola Kepegawaian, Pembantu bendahara.

Untuk menjawab akan program tersebut diperlukan kesiapan user yang akan mengoperasikan komputer untuk database. Dalam mendukung kinerja aparatur penyelenggara kependudukan dan catatan sipil mutlak diperlukan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat struktural maupun teknis/fungsional. Menjawab kondisi tersebut, personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagian besar telah mengikuti diklat-diklat struktural maupun teknis dan fungsional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah mengikuti diklat Struktural

NO	DIKLAT STRUKTURAL	ESELON			
		I	II	III	IV
1	Diklatpim TK I	-	-	-	-
2	Diklatpim TK II	-	-	-	-
3	Diklatpim TK III	-	-	3	-
4	Diklatpim TK IV	-	-	-	1
JUMLAH		-	-	3	1

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dukcapil April 2025

Data Pegawai yang telah Mengikuti Kursus/Diklat Teknis dan Fungsional

NO	**NAMA DIKLAT**	**PENYELENGGARA**	**JUMLAH**
1	Bimtek SIAK	-	-
2	Diklat Arsip Daerah	Dinas Arsip	1 Orang
3	Bimtek Keuangan Daerah	BPKAD	1 Orang
4	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	SEKDA	1 Orang
5	Perpustakaan	-	-
6	Analisa Jabatan	-	-

NO	NAMA DIKLAT	PENYELENGGARA	JUMLAH
7	SIAK Administrator Database	-	-
8	Bendahara pengeluaran	BPSDM Jatim	1 Orang
9	Diklat Administrasi Kepegawaian	-	-
10	Bimtek Operator SIAK	-	-
11	Diklat Administrasi Database (ADB)	Kemendagri	1 Orang
12	Diklat Perencanaan dan Penganggaran	BPSDM Provinsi Jatim	1 Orang
13	Bimtek PPRG	BKD	1 Orang
14	Bimtek Wistle Blowing Syistem	Inspektorat Daerah	1 Orang
15	Bimtek Maturitas SPIP	Inspektorat Daerah	1 Orang

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dukcapil April 2025

Berdasarkan data tersebut di atas dapat terlihat bahwa personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagian besar telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

Sumber daya aparatur tersebut melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan berdasarkan struktur organisasi diatas. Dari segi kuantitas sampai dengan saat ini sumber daya aparatur yang ada masih belum seimbang karena disamping pelayanan di dinas baik pelayanan secara daring maupun manual, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melayani keliling dengan memakai mobil pelayanan administrasi kependudukan keliling, khususnya bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.

Tabel : Jumlah Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Jabatan Eselon

No.	Jabatan/eselon	Jumlah Pegawai
1	Eselon II b	1 orang
2	Eselon III a	1 orang
3	Eselon III b	3 orang
4	Eselon IV a	1 orang

Selain jumlah pegawai yang telah disebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk mempunyai 36 orang Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai petugas administrasi dan membantu operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yaitu sebagai verifikator pelayanan online dalam memproses dokumen kependudukan dan catatan sipil yang ada di dinas.

b. Aset / modal / Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk menempati gedung di Jalan Dermojoyo Nomor 30 Nganjuk dengan luas bangunan 1.293 M2 berdiri di atas tanah seluas 1.917 M2.

Sarana dan prasarana lain yang dimilki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah :

Tabel : Sarana dan Prasarana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

No.	Sarana	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan roda 4	5	unit
2	Kendaraan roda 2	2	unit
3	Laptop	15	unit
4	Komputer PC	25	unit
5	Card Reader	8	unit
6	Meja	57	buah
7	Kursi	200	buah

8	Filling Cabinet	13	buah
9	Scanner	7	unit
10	Brankas	2	buah
11	Rak arsip	90	buah
12	Printer	34	unit
13	UPS	10	unit
14	LCD Proyektor	1	unit
15	Genset	4	unit
16	Server	3	unit
17	AC	21	unit
18	Alat pemadam kebakaran	7	buah
19	Kipas angin	12	buah
20	Kursi tunggu	20	buah
21	Camera	15	unit
22	TV	6	Unit
23	CCTV	3	Unit
24	ENROLLMENT	3	unit

Catatan: Data KIB B bulan April 2025

Sampai saat ini, sarana dan prasarana di atas masih sangat kurang memadai dalam rangka menunjang kelancaran tugas sehari-hari, namun dengan kemajuan teknologi informasi serta tingkat kebutuhan masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang cukup tinggi dewasa ini, menuntut untuk perbaikan maupun pengembangan sarana prasarana kantor utamanya dalam mengakses informasi data dari pusat maupun propinsi serta untuk pelayanan administrasi kependudukan online sampai dengan tingkat desa/kelurahan.

c. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perangkat daerah di Kabupaten Nganjuk yang melayani masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Sebagai unit pelayanan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kinerja sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan pelayanan kependudukan secara online dan bisa dilakukan dimana saja, kapan saja, dan tanpa

biaya. Sedudo Dukcapil dapat di akses melalui Website *https://sedudo.nganjukkab.go.id/landing_page/*dan di 20 kecamatan dan 284 desa/kelurahan yang berada di masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Nganjuk Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace, Kecamatan Prambon, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Baron, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Gondang, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Ngluyu, dan Kecamatan Jatikalen.

2. Pelayanan ULAM SEPAT (Unit Layanan Adminduk Mobile Secara Cepat dan Tepat) yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Nganjuk disambut dengan antusias oleh warga Kecamatan Tanjunganom dan sekitarnya. ratusan warga yang datang untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Dalam pelayanan ULAM SEPAT hari ini, tercetak lebih dari 100 KTP-EL (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) terdiri dari KTP-EL rusak, perubahan data dan cetak KTP-EL Pemula.
3. Telah dilakukan layanan sosialisasi Adminduk dan Jebol Gawang (Jemput Bola Gawekne Administrasi Kependudukan Warga Nganjuk) untuk perekaman biometrik KTP elektronik ke sekolah-sekolah serta desa-desa bahkan sampai di alamat rumah sehingga masyarakat lebih terbantu dalam pengurusan KTP elektronik terutama bagi masyarakat yang mengalami cacat fisik/difabel ataupun mental.
4. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan layanan Adminduk dengan perangkat daerah / rumahsakit / Klinik /puskesmas. Dimana kelompok sasaran layanan adminduk adalah masyarakat agar mengurus mandiri melalui lembaga yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanapa harus datang

ke dinas untuk mendapatkan layanan akta kelahiran, kartu keluarga dst.

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk mengadakan layanan konsultasi dan pengaduan baik melalui surat dan datang langsung ke Dinas atau juga bisa melalui media elektronik SP4N lapor! Dan layanan seperti telepon atau Whatapps (0822-3154-0889)
6. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Kecamatan, dalam rangka mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian penerbitan KIA, bahwa pengajuan berkas penerbitan KIA agar melalui Kantor Kecamatan sesuai keberadaan Sekolah masing-masing. dapat mengajukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau melalui Aplikasi Sedudo secara mandiri, maupun melalui Desa/Kecamatan. Setelah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pengajuan melalui Kolektif oleh Lembaga Sekolah PAUD/TK/SD/SMP untuk dikirim berupa file berbentuk jpg yang berisikan berkas/data masing-masing anak/siswa termasuk pas foto.
7. layanan dukcapil di Mall Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk dengan melayani secara Offline bagi warga mengurus dokumen adminduk dapat dilayanan secara langsung oleh petugas dukcapil.

Tingkat capaian kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk berdasarkan sasaran/target telah menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian tingkat capaian kinerja yang telah dibuktikan selama lima Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKU	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan	√	√	78,2	78,5	78,7	80	_	75,04	80,25	83,88	91,98	-	95,96%	102,23%	106,58%	114,98%	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKU	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Pelayanan Publik Masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan	√	√	_	_	_	_	3,51	_	_	_	_	4,62	_	_	_	_	131,62%
	Cakupan penerbitan KK			100%	100%	100%	100%	100%	99,78%	99,72%	99,93%	99,99%	100%	99,78%	99,72%	99,93%	99,99%	-
	Cakupan Kepemilikan KIA	√	√	20%	30%	40%	40%	50%	18,49%	23,72%	25,75%	27,42%	30,02%	92,45%	79,07%	64,38%	68,55%	60,04%
	Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18	√	√	81,50%	84%	86,50%	89,00%	93,50%	87,83%	89,46%	83,88%	88,16%	93,52%	107,76%	106,50%	96,97%	99,05%	100,02%
	Cakupan kepemilikan KTP El	√	√	100%	100%	100,00%	100,00%	99,50%	97,08%	97,96%	93,58%	99,78%	99,43%	97,08%	97,96%	93,58%	99,78%	99,92%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKU	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah instansi yang melakukan Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	√	√	2	5	7	8	8	5	5	7	8	8	250%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Data kependudukan update SIAK Terpusat	√	√	-	-	-	-	1.191.828	-	-	-	-	1.152.575	-	-	-	-	96,71%

Tabel II.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	–	6.986.356.870	10.202.795.439	6.163.168.777	7.654.864.200	–	5.386.045.019	9.054.953.482	5.601.204.239	7.455.108.765	–	77,09 %	88,75 %	90,88 %	97,39 %		
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	–	404.471.100	361.879.300	521.667.700	815.617.700	–	404.330.000	239.959.950	452.643.590	631.813.002	–	99,97 %	66,31 %	86,77 %	77,46 %		
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	–	–	180.092.750	239.431.950	397.884.900	–	–	112.913.600	214.508.860	340.227.272	–	–	62,70 %	89,59 %	85,51 %		
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	–	–	171.877.650	503.961.750	354.841.200	–	–	169.547.922	451.041.080	334.961.420	–	–	98,64 %	89,50 %	94,40 %		
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	–	28.397.700	–	6.590.000	156.450.000	–	28.387.500	–	6.450.000	142.002.599	–	99,96 %	–	97,88 %	90,77 %		

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD

1. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan

   Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan adalah nilai rata-rata tertimbang dari persepsi masyarakat terhadap unsur pelayanan publik yang diukur melalui survei dengan skala penilaian 1–4, kemudian dikonversi ke skala 25–100.
2. Indeks Pelayanan Publik Masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan

   Alat untuk mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah yang dinilai oleh Kemenpan RB
3. Cakupan penerbitan KK

   persentase jumlah Kepala Keluarga (KK) yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK) dibandingkan dengan total Kepala Keluarga yang ada dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indikator ini mengukur sejauh mana warga dalam suatu wilayah telah memiliki dokumen resmi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
4. Cakupan Kepemilikan KIA

   persentase anak usia wajib KIA yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dibandingkan dengan jumlah total anak usia wajib KIA dalam suatu wilayah pada tahun tertentu. Semua anak yang berdomisili di wilayah administratif tertentu (kabupaten/kota) yang termasuk dalam rentang usia wajib memiliki KIA, yaitu 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari.
5. Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18

   persentase penduduk dalam rentang usia 0-18 tahun yang telah memiliki dokumen akta kelahiran dibandingkan Jumlah seluruh warga negara berusia 0-18 tahun dalam satu wilayah pada periode waktu tertentu.
6. Cakupan Kepemilikan KTP el

Persentase jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el dibandingkan dengan jumlah penduduk yang wajib memilikinya (usia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah) dalam satu wilayah pada periode waktu tertentu. Penduduk yang wajib memiliki KTP Elektronik, yaitu Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-El.

7. Jumlah instansi yang melakukan Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
   Pembilang Perangkat Daerah yang sudah menggunakan data administrasi kependudukan yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama. Penyebut Seluruh organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada kepala daerah kabupaten/Kota dan yang berpotensi menggunakan data Kependudukan.
8. Jumlah data Kependudukan Update SIAK terpusat yaitu jumlah penyajian data kependudukan dalam 1 tahun.

d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok sasaran layanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah pelayanan adminduk kepada masyarakat dalam hal pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta fasilitasi Pemanfaatan data kependudukan untuk perangkat daerah dalam mendukung pelayanan publik.

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menghadapi tantangan pengembangan pelayanan dituntut dalam berinovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi yang telah dilaksanakan antara lain :

No	Nama Inovasi	Uraian
1.	Dukcapil Menyapa Warga (DMW)	Melaksanakan *Video Conference* (*zoom*) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
2.	Aplikasi ”Sedudo” (Sistem Elektronik Terpadu Daerah Online)	Aplikasi online bagi masyarakat untuk membuat surat keterangan dari desa/ kelurahan, dokumen kependudukan, serta bagi Kepala

No	Nama Inovasi	Uraian
		Desa untuk menyusun laporan kinerja Pemerintah Desa.
3.	Aplikasi Salipuk	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan *Online* (berbasis *Web*)
4.	Aplikasi Lasmini dan SIANIK(sistem Antrian Online Dukcapil)	Layanan Informasi dan Konsultasi Layanan Administrasi Kependudukan (*chatbot*) Mengambil Antrian Melalui Chat Whatapps : 0812 2160 0100
5.	ULAM SEPAT (Unit Layanan Adminduk Mobile Secara Cepat dan Tepat)	Pelayanan Adminduk Mobilling di Kecamatan.
6.	JEBOL GAWANG (Jemput Bola Gawekne Administrasi Kependudukan Warga Nganjuk)	Pelayanan Jempul Bola Layanan Adminduk ODGJ, Disabilitas, Kecelakaan, Perekaman KTP el, IKD dan KIA
7.	Layanan Pengaduan dan Konsultasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk	Pengaduan dan Konsultasi akan dilayani pada Senin-jum'at Pukul 08.00-14.30 WIB Kirimkan pesan dengan format : Nama_NIK Pesan Pengaduan Pada Nomor WA : 0822-3154-0889
8.	Mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)	layanan pencetakan dokumen kependudukan bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Inovasi ini dirancang khusus agar masyarakat bisa mencetak dokumen dengan cepat, mudah, gratis dan berstandar sama tanpa diskriminasi

Semangat untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan yang akurat, tertib dan akuntabel merupakan modal dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang terus dikembangkan saat ini. Namun demikian tentunya dinas tetap harus berbenah dan selalu mengkaji berbagai macam potensi yang dimiliki dan juga kendala-kendala yang akan dihadapi dimasa yang akan datang.

Tantangan nyata yang dihadapi oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya pengembangan

pelayanan yang baik dibidang administrasi kependudukan adalah sebagai berikut :

a. Belum sempurnanya sistem pelaporan administrasi kependudukan mulai dari desa, kecamatan, maupun dinas sendiri.
b. Belum tersedianya tenaga khusus pengadministrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau petugas register desa.
c. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik komputerisasi maupun jaringannya di seluruh desa se Kabupaten Nganjuk.
d. Belum tersedianya dana operasional untuk memotivasi tenaga khusus atau petugas register desa.
e. Belum tercukupinya petugas operator bidang kependudukan maupun pencatatan sipil.
f. Harapan masyarakat tentang percepatan pelayanan administrasi kependudukan.

Disamping menghadapi tantangan nyata tersebut, tentunya masih ada peluang-peluang yang dimiliki oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pengembangan pelayanan.

Adapun peluang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Political will dari Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mendukung pengembangan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengembangan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
c. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa cukup memadai untuk diberi tugas khusus pengadministrasi kependudukan.
d. Kesadaran masyarakat mulai meningkat dalam mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan.
e. Kebutuhan data kependudukan yang akurat, tertib dan akuntabel bagi penyelenggara negara.

f. Pentingnya dokumen kependudukan bagi persyaratan pengurusan kebutuhan masyarakat disegala aspek kehidupan.

e. Mitra Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dalam pemberian Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah Rumah Sakit Daerah Nganjuk, Rumah Sakit Daerah Kertosono, Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk, Rumah Sakit Islam Aisyiyah Nganjuk, RS DKT Kediri, RS Medical Center Jombang, Puskesmas Prambon, Klinik Ngudi Waluyo Gondang. Dalam upaya pemberian layanan terkait pemanfaatan data kependudukan mendukung pelayanan publik dengan 8 perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan, RSD Nganjuk, RSD Kertosono, Dinas Sosial PPPA, Dinas Kominfo, Dinas PMPTSP, Dinas PPKB, Bapenda, sementara progres berjalan terdapat beberapa Perangkat daerah yang mengajukan Permohonan perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan yaitu Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas KPP dan Bappeda Kabupaten Nganjuk.

2.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Identifikasi Permasalahan

Dinamisasi penyelenggaraan sistem dan tata kelola administrasi kependudukan di Kabupaten Nganjuk yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari dinamisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah, masih menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang membutuhkan upaya pemecahan masalah secara sistematis.

Disamping permasalahan penyempurnaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), ternyata juga ditemui kendala dan permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Hal ini terjadi karena ternyata masih dijumpai penduduk atau masyarakat yang enggan untuk mengurus dan

melaporkan perubahan peristiwa kependudukan dan perubahan peristiwa penting yang lainnya, yang meliputi perubahan KK, KTP, maupun perubahan akta-akta catatan sipil dengan berbagai alasan yang dikemukakan.

Dinamika masyarakat telah menuntut pada kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia baru, yaitu masyarakat berkepribadian, berkualitas, mandiri dan berdaya saing dalam suatu wadah NKRI dan berkedudukan yang sama serta tidak adanya diskriminasi. Namun dalam perjalanan dan proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan strategis.

Beberapa masalah yang dijumpai yaitu sebagai berikut :

a) Jumlah penduduk yang besar dan belum tertata

Jumlah penduduk yang besar dengan luas wilayah dan tingkat pertumbuhan yang masih relatif tinggi, disertai persebaran yang tidak seimbang dan kualitasnya masih rendah, merupakan permasalahan pokok dalam penataan kependudukan khususnya dibidang administrasi kependudukan. Sementara kebijakan yang komprehensif belum dapat diwujudkan mengingat kewenangannya masih berada diberbagai sektor.

b) Pemahaman substansi dan materi adminduk

Sosialisasi berbagai kebijakan dibidang administrasi kependudukan ke berbagai kalangan belum maksimal. Pemahaman masyarakat dan aparat tentang pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil umumnya masih sering terjadi adanya kerancuan, meskipun keduanya ada keterkaitan tetapi masing-masing merupakan domain yang berbeda. Pendaftaran penduduk lebih ditekankan kegiatan administratif untuk identifikasi penduduk menurut domisili, sedangkan pencatatan sipil menekankan kepada aspek hukum yang menentukan status keperdataan seseorang atas peristiwa yang dialaminya. Sebagai pembuktian status diterbitkan dokumen kependudukan yang mensyahkan perubahan akibat peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami penduduk.

c) Masih lemahnya/kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Hal ini terjadi karena ternyata masih dijumpai penduduk atau masyarakat yang enggan untuk mengurus dan melaporkan perubahan peristiwa kependudukan dan perubahan peristiwa penting yang lainnya, yang meliputi perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun perubahan akta kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, dan yang lainnya dengan berbagai alasan yang dikemukakan.

d) Keterbatasan kompetensi SDM aparatur pengelola tertib administrasi kependudukan dari tingkat Dinas sampai dengan Kelurahan/Desa.

Sebagai contoh permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk saat ini adalah masih adanya penduduk yang belum mengurus perubahan Kartu Keluarga (KK), kemudian juga masih banyak penduduk yang belum melakukan perekaman KTP. Begitu jugna dengan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akta kelahiran terutama penduduk yang berusia 40 tahun keatas.

b. Perumusan Isu-isu Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, maka perlu mengidentifikasi rumusan isu-isu strategis, data kependudukan sangat dinamis dan dipengaruhi penduduk lahir, mati, pindah, datang (LAMPID), demikian juga adanya penduduk tua, sakit dan disabilitas yang mempunyai keterbatasan dalam memperoleh layanan di bidang kependudukan, namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berusaha untuk selalu meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama diantaranya melalui berbagai inovasi-inovasi yang telah kami jelaskan pada BAB sebelumnya Keadaan Penduduk kabupaten Nganjuk antara lain dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Jumlah dan pertumbuhan penduduk

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024 mencapai 1.152.575 jiwa, yang terdiri atas 579.531 penduduk laki-laki dan 573.044 penduduk perempuan. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2023 mencapai 1.139.617 jiwa, maka dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 12.958 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	TOTAL
1	Sawahan	20.253	20.104	40.357
2	Ngetos	20.065	19.904	39.969
3	Berbek	30.936	30.103	61.039
4	Loceret	39.497	39.210	78.707
5	Pace	34.965	34.197	69.162
6	Prambon	38.057	37.611	75.668
7	Ngronggot	44.178	42.962	87.140
8	Kertosono	28.697	28.589	57.286
9	Patianrowo	23.508	22.852	46.360
10	Baron	28.652	27.963	56.615
11	Tanjunganom	61.126	60.588	121.714
12	Sukomoro	24.535	24.298	48.833
13	Nganjuk	35.283	35.791	71.074
14	Bagor	32.143	32.045	64.188
15	Wilangan	15.884	15.852	31.736
16	Rejoso	37.272	37.030	74.302
17	Gondang	29.111	28.822	57.933
18	Ngluyu	7.301	7.282	14.583
19	Lengkong	17.389	17.231	34.620
20	Jatikalen	10.679	10.610	21.289
Jumlah		**579.531**	**573.044**	**1.152.575**

Catatan : Data DKB semester II Tahun 2024

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nganjuk Per Kecamatan Tahun 2015-2024 (Jiwa)

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sawahan	35.883	36.524	37.134	37.874	38.458	39.109	39.515	39.572	39.705	40.357
2	Ngetos	34.731	35.406	36.147	37.001	37.736	38.433	38.835	38.910	39.200	39.969
3	Berbek	54.702	55.752	56.813	57.896	58.882	59.827	60.484	60.606	60.131	61.039
4	Loceret	69.537	70.879	72.180	73.670	74.897	76.144	77.084	77.114	77.914	78.707
5	Pace	61.213	62.473	63.597	64.903	65.996	67.148	67.900	67.986	68.435	69.162
6	Prambon	66.706	68.103	69.367	70.717	71.989	73.254	74.020	74.207	74.725	75.668
7	Ngronggot	76.864	78.581	80.149	81.837	83.266	84.751	85.591	85.832	86.066	87.140
8	Kertosono	51.247	52.328	53.232	54.202	55.154	56.091	56.633	56.727	56.925	57.286
9	Patianrowo	41.157	41.918	42.660	43.469	44.203	44.966	45.601	45.558	45.902	46.360
10	Baron	49.566	50.631	51.545	52.680	53.656	54.612	55.262	55.341	56.024	56.615
11	Tanjunganom	108.215	110.339	112.252	114.522	116.533	118.486	119.916	119.998	120.687	121.714
12	Sukomoro	42.935	43.777	44.539	45.444	46.203	46.989	47.527	47.567	48.204	48.833
13	Nganjuk	63.432	64.613	65.710	66.782	67.770	68.787	69.753	69.608	70.283	71.074
14	Bagor	57.204	58.218	59.185	60.640	61.262	62.195	62.898	62.918	63.497	64.188
15	Wilangan	28.104	28.698	29.182	29.775	30.276	30.759	31.081	31.146	31.331	31.736
16	Rejoso	66.782	68.016	69.130	70.352	71.446	72.545	73.336	73.399	73.668	74.302
17	Gondang	51.171	52.126	53.007	54.055	54.845	55.751	56.289	56.435	57.155	57.933
18	Ngluyu	13.296	13.507	13.672	13.869	14.033	14.217	14.372	14.400	14.480	14.583
19	Lengkong	30.883	31.401	31.867	32.410	32.933	33.492	33.833	33.895	34.139	34.620
20	Jatikalen	19.199	19.513	19.810	20.134	20.415	20.768	20.980	21.000	21.146	21.289
		1.022.827	**1.042.803**	**1.061.178**	**1.081.910**	**1.099.953**	**1.118.324**	**1.130.910**	**1.132.219**	**1.139.617**	**1.152.575**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nganjuk tahun 2024

1. Struktur Umur

Data Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Nganjuk

NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR																TOTAL
		0-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	
1	SAWAHAN	2288	2546	2769	2554	2972	2883	2667	2587	3019	2799	3045	2890	2438	1750	1361	1789	**40357**
2	NGETOS	2374	2811	2912	2777	2829	2938	2696	2891	2955	2825	2708	2621	2125	1543	1191	1773	**39969**
3	BERBEK	3529	4179	4702	4472	4560	4479	4131	4434	4797	4570	4175	3959	3107	2271	1497	2177	**61039**
4	LOCERET	4369	5272	5765	5702	5885	5770	5259	5564	6046	5598	5513	5241	4384	3133	2099	3107	**78707**
5	PACE	3855	4700	5029	4951	4993	4847	4421	4745	5432	5064	4785	4643	3750	2766	1925	3256	**69162**
6	PRAMBON	4321	5055	5770	5625	5735	5306	4733	5069	5992	5523	5297	5081	4014	3050	2133	2964	**75668**
7	NGRONGGOT	4733	6185	6869	6884	6567	5947	5495	5883	7095	6720	6146	5497	4344	3167	2231	3377	**87140**
8	KERTOSONO	2852	3800	4582	4487	4474	3973	3478	3666	4609	4354	3966	3756	3075	2385	1613	2216	**57286**
9	PATIANROWO	2478	3167	3587	3396	3461	3264	2954	3281	3548	3424	3200	2986	2477	1869	1402	1866	**46360**
10	BARON	3168	3943	4505	4186	4245	3853	3728	3833	4712	4271	3783	3516	2772	2279	1535	2286	**56615**
11	TANJUNGANOM	6542	8086	9068	9121	9084	8467	7707	8228	9777	9012	8544	8081	6504	4850	3354	5289	**121714**
12	SUKOMORO	2937	3345	3746	3485	3615	3311	3176	3483	3975	3592	3458	3148	2585	1858	1205	1914	**48833**
13	NGANJUK	3635	4569	5652	5426	5460	4995	4548	4848	5750	5374	5062	4698	3882	3023	1868	2284	**71074**
14	BAGOR	3499	4210	4792	4617	4525	4466	4141	4159	5026	4687	4666	4433	3525	2792	1928	2722	**64188**
15	WILANGAN	1729	2055	2358	2101	2191	2169	1925	2072	2551	2432	2328	2217	1723	1464	995	1426	**31736**
16	REJOSO	3917	4663	5277	5239	5360	5015	4682	4873	5965	5524	5469	5091	4167	3385	2517	3158	**74302**
17	GONDANG	3099	3653	4206	4073	4149	4073	3655	4013	4639	4422	3956	3814	3232	2546	1859	2544	**57933**
18	NGLUYU	705	698	869	865	989	1005	901	867	1038	1142	1119	1065	907	802	660	951	**14583**
19	LENGKONG	1796	2212	2505	2419	2545	2398	2174	2209	2704	2521	2304	2321	2152	1667	1167	1526	**34620**
20	JATIKALEN	1146	1330	1439	1438	1455	1469	1433	1492	1528	1557	1536	1584	1299	1016	643	924	**21289**
	TOTAL	**62972**	**76479**	**86402**	**83818**	**85094**	**80628**	**73904**	**78197**	**91158**	**85411**	**81060**	**76642**	**62462**	**47616**	**33183**	**47549**	**1.152.575**

Catatan : Data DKB semester II Tahun 2024

Berdasarkan analisa dari permasalahan yang mempengaruhi pelayanan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS baik secara internal maupun eksternal yang kemudian dilakukan identifikasi berbagai isu-isu strategis terkait peningkatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

1. Penguatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Sesuai dengan rumusan hasil Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 24 April 2025 di Jakarta, dengan tema “Data Kependudukan dan Identitas Kependudukan Digital sebagai Fondasi Layanan Publik yang Inklusif dan Pilar Transformasi Digital Nasional”, dilaksanakan secara hybrid (Daring/Luring) yang diikuti oleh jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Pejabat Administrator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota tujuan untuk:

1. Menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran Dukcapil pusat dan daerah dalam mendukung data kependudukan dan IKD sebagai fondasi layanan publik yang inklusif dan pilar transformasi digital nasional.
2. Mendorong upaya percepatan transformasi digital nasional.
3. Meningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia.

Ditjen Dukcapil dan Seluruh Jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen, konsisten, dan siap:

1. Melaksanakan 4 (empat) arahan pokok Menteri Dalam Negeri, yaitu:
    a. Melakukan berbagai upaya progresif untuk menjamin akurasi data kependudukan, karena Dukcapil akan terus dihadapkan pada tantangan tingginya dinamika penduduk seperti pindah, datang, lahir, mati, kawin dan cerai. Untuk itu inovasi harus terus dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat dan pengguna data kependudukan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data.

b. Ancaman siber terhadap data kependudukan semakin nyata di tengah konflik global dan kompetisi data. Penguatan teknologi penyimpanan (cloud hybrid), firewall, enkripsi, dan sistem deteksi ancaman (threat detection) harus menjadi prioritas investasi ke depan. Ditjen Dukcapil dan seluruh Dinas Dukcapil agar terus berkomitmen menjaga keamanan informasi dan data kependudukan melalui penerapan Standar ISO 27001:2013.
c. Melakukan percepatan aktivasi IKD melalui strategi jemput bola dan kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah serta pihak terkait lainnya, bagi masyarakat yang memiliki smartphone tanpa meninggalkan KTP-el bagi penduduk yang tidak memiliki smartphone.
d. Meningkatan kualitas SDM Dukcapil dan pemahaman masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi IKD. Oleh karena itu, pelatihan intensif untuk aparatur Dukcapil, serta kampanye edukatif ke masyarakat mengenai manfaat dan keamanan IKD, menjadi program penting yang harus digerakkan secara sistematis.

Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	masih adanya masyarakat yang belum mengerti tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan	Peningkatan sarana prasarana pendukung dan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat dan akurat.	Transformasi Digital dan Identitas Digital	Mendorong upaya percepatan transformasi digital nasional.	Menginternalisasikan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, serta indikator dan target RPJMN 2025–2029 ke dalam tujuan, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029 untuk urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	Peningkatan pelayanan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan
Pelayanan Pencatatan Sipil	Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap substansi dan materi administrasi kependudukan	Belum optimalnya kepemilikan akta kelahiran		Meningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia.		Peningkatan kerjasama/kolaborasi antar instansi atau lembaga
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dan informasi data kependudukan	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40%		Menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran Dukcapil pusat dan daerah		Peningkatan pengetahuan masyarakat dan aparatur terhadap substansi dan materi

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	antar instansi/lembaga	berpendapatan bawah belum mencapai target		dalam mendukung data kependudukan dan IKD sebagai fondasi layanan publik yang inklusif dan pilar transformasi digital nasional.		administrasi kependudukan
		Birokrasi yang adaptif				Peningkatan sistem layanan berbasis digital
		Pemerataan layanan public berkualitas				

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

- Tujuan

Tujuan dimaksud ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dalam mendukung pembangunan nasional dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas maka visi yang ditetapkan oleh Bupati Nganjuk adalah “mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju, sejahtera dan bermartabat”

Secara konseptual tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tujuan yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan senantiasa bermuara kepada tercapainya

’’Terwujudnya layanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien’’ dan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai simpul jejaring akselerasi kesejahteraan masyarakat, tepatnya pada misi ke-2 yaitu “Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan”.

- Sasaran

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2025 - 2029 adalah :

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
- Meningkatnya kualitas layanan publik	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan administrasi kependudukan (Indeks)	90,97	91,00	91,30	91,50	91,75	92,00	92,00	
		Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP-El (%)	99,44	99,49	99,54	99,59	99,64	99,69	99,74	
			Cakupan kepemilikan KK (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun (%)	93.53	95	96	97	98	99	99	
			Cakupan kepemilikan KIA (%)	30,02	33	35	40	45	50	55	

Bahwa guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi untuk mengaktualisasikan sasaran tersebut. Adapun strategi dan kebijakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

3.2 Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah adalah langkah-langkah yang diambil oleh Organisasi Perangkat Daerah tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025 - 2029 dengan upaya percepatan dan pendekatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3.3 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah :

“Memantapkan tata kelola, manajemen penyelenggaraan dan pelaporan Administrasi Kependudukan serta mengembangkan dan memadukan kebijakan Sistem Informasi sehingga mampu

menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat, dan memenuhi kepentingan publik."

Visi : "MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT"			
Misi : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Layanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Pendekatan dan percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan on line yang terhubung dalam jaringan dengan kecamatan dan desa/kelurahan	Memantapkan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan dan pelaporan Administrasi Kependudukan serta mengembang kan dan memadukan kebijakan Sistem Informasi

Tabel III.3

Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Sosialisasi dan jemput bola pelayanan dokumen kependudukan di wilayah dengan cakupan terendah	Implementasi sistem informasi kependudukan (SIAK) versi terbaru secara bertahap	Integrasi data kependudukan dengan sistem layanan publik di tingkat daerah (misalnya, kesehatan, pendidikan)	Sosialisasi dan piloting implementasi IKD kepada masyarakat	Perluasan implementasi IKD secara menyeluruh
Pembenahan sistem pengelolaan arsip fisik dan digital awal	Verifikasi dan validasi data kependudukan secara aktif	Penyediaan data kependudukan yang agregat untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah	Peningkatan keamanan sistem informasi kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan untuk inovasi layanan publik lainnya
Peningkatan kapasitas SDM terkait pelayanan dasar dan penggunaan sistem informasi	Pengembangan modul layanan daring (online) untuk beberapa jenis layanan.	Perluasan jenis layanan daring.	Pengembangan fitur-fitur lanjutan pada layanan daring.	Penguatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan data

Tabel III.4

Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Penguatan Pondasi Percepatan Pembangunan Daerah. Peningkatan kualitas SDM, Pemenuhan Infrastruktur Dasar, Peningkatan Jaminan Sosial dan peningkatan kualitas tatakelola Pemerintahan merupakan pondasi Percepatan pembangunan daerah yang harus dipenuhi di tahun pertama pemerintahan. Penguatan terhadap unsur pondasi pembangunan tersebut memiliki peran strategis (Leverage), karena berpengaruh besar terhadap kesiapan daerah dalam menghadapi tahapan pembangunan selanjutnya	Memantapkan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan dan pelaporan Administrasi kependudukan serta mengembangkan dan memadukan kebijakan Sistem Informasi	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Merujuk pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil melalui program-programnya berbagai rencana akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025 - 2029 antara lain :

1. Pembenahan administrasi kependudukan dengan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu segera dilaksanakan sehingga tertib administrasi kependudukan secara bertahap dapat diwujudkan. Hal ini memerlukan komitmen dan perhatian besar baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten sendiri. Untuk itu perlu dukungan dan ketersediaan SDM aparatur yag handal dan mengerti dengan bidang tugasnya.
2. Percepatan proses validasi database kependudukan yang dilakukan melalui berbagai cara antara lain pelaksanaan perekaman KTP-el dengan upaya jemput bola di desa-desa, ke rumah-rumah penduduk berkebutuhan khusus, penghapusan data ganda nasional, pemutakhiran data anomali, serta data tidak aktif, dengan tujuan pemberian **satu nomor identitas untuk satu orang** merupakan wujud nyata indikator keberhasilan pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Untuk itu dibutuhkan peningkatan jaringan

komunikasi data dengan kecamatan se Kabupaten Nganjuk agar dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses up-dating data penduduk.

3. Pelaksanaan penataan arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan entry data/arsip dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil ke dalam arsip digital dengan memakai aplikasi ARSIP dengan harapan dapat mengatasi masalah arsip yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik dari segi penataan maupun pengelolaannya. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan arsip pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian.
4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Kegiatan ini dilakukan untuk memonitor serta melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Peningkatan SDM dan disiplin Aparatur Penyelenggara Administrasi Kependudukan. Ditujukan untuk peningkatan kemampuan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar dalam pemberian pelayanan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan lebih profesional dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Peningkatan SDM dimaksud diwujudkan dalam bentuk pengiriman Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun Bimbingan Teknis (Bintek).

Adapun program kerja dan langkah konkrit kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan serta sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

4.1 Rencana Program

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran antara lain :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pendaftaran penduduk

3. Program pencatatan sipil
4. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
5. Program pengelolaan profil kependudukan

4.2 Rencana Kegiatan

Untuk menunjang pelaksanaan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil direncanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan :

- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah
- Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
- Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Administrasi umum perangkat daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

2. Program pendaftaran penduduk

Kegiatan :

- Pelayanan pendaftaran penduduk
- Penyelenggaraan pendaftaran penduduk
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk

3. Program pencatatan sipil

Kegiatan :

- Penyelenggaraan pencatatan sipil
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil

4. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Kegiatan :

- Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
  Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

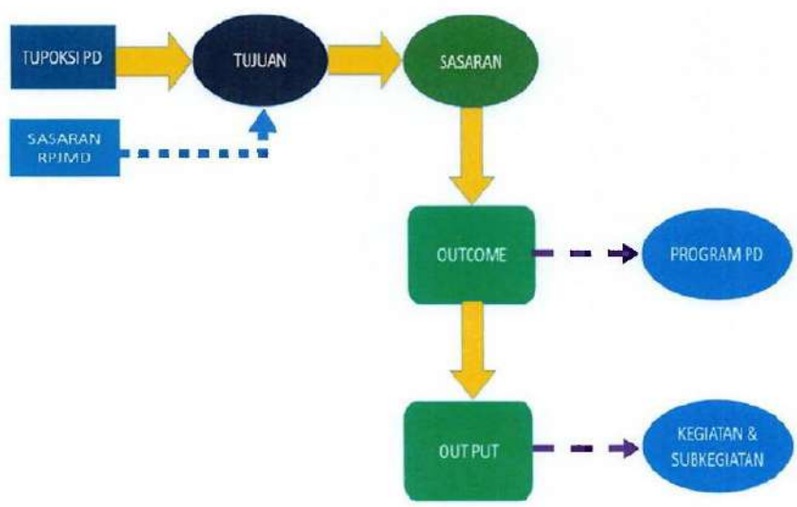
5. Program pengelolaan profil kependudukan

Kegiatan :

- Penyusunan profil kependudukan

agar setiap intervensi pembangunan yang dirancang benar-benar terarah dan memberikan kontribusi nyata terhadap capaian kinerja strategis lima tahunan perangkat daerah Gambaran kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Gambar 4.1 berikut menyajikan kerangka perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan logis antara mandat kelembagaan (tupoksi) dengan pencapaian kinerja pembangunan lima tahun mendatang.

Tujuan perangkat daerah pada gambar ini mencerminkan kinerja jangka menengah yang ingin dicapai selama lima tahun, dan disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. **Sasaran** merupakan tahapan atau milestone kinerja yang perlu dilalui untuk mencapai tujuan, yang kemudian dijabarkan ke dalam outcome dan output. **Outcome** menggambarkan kondisi yang menunjukkan telah berfungsinya output, sedangkan **output** adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya (manusia, anggaran, metode, material, dan alat).

Namun demikian, pada implementasinya, program, kegiatan, dan subkegiatan yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keterkaitan yang kuat dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Belum tergambarnya alur 'cascading' secara utuh dari tujuan–sasaran–outcome–output menjadi catatan penting yang perlu dibenahi, agar setiap intervensi pembangunan yang dirancang benar-benar terarah dan memberikan kontribusi nyata terhadap capaian kinerja strategis lima tahunan perangkat daerah Dari program, kegiatan, indikator kinerja dan telah ditentukan pula sasaran, juga telah direncanakan pendanaannya karena kegiatan tanpa adanya dana atau anggaran yang mendukung kegiatan tidak akan berjalan dan tujuan dari program tidak akan tercapai. Hal tersebut telah tertuang dalam tabel berikut :

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
- Meningkatnya kualitas layanan publik	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan administrasi kependudukan (Indeks)		
		Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan			Cakupan kepemilikan KTP-El (%)		
					Cakupan kepemilikan KK (%)		
					Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun (%)		
					Cakupan kepemilikan KIA (%)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Perangkat Daerah				
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.12.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.12.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk		Cakupan kepemilikan IKD (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Cakupan Penerbitan KIA (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Cakupan penerbitan KK (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Cakupan penerbitan KTP-El (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Meningkatkan kemudahan akses layanan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Pendaftaran Penduduk (Laporan)		
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01.0008 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatkan kemudahan akses layanan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
				Meningkatkan kemudahan akses layanan	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil		Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Cakupan penerbitan akta kematian (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Cakupan penerbitan akta perceraian (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Cakupan penerbitan akta perkawinan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Meningkatkan kemudahan akses layanan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	
				Meningkatkan kemudahan akses layanan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan		Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (%)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya pengajuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
				Meningkatnya pengajuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Meningkatnya pengajuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan		Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan (%)	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
				Tersusunya profil kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

\

TABEL 4.2 PROGRAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					10.546.000.000,00		10.928.000.000,00		11.249.000.000,00		11.599.000.000,00		11.976.000.000,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.701.000.000,00		8.953.000.000,00		9.129.000.000,00		9.299.000.000,00		9.576.000.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	78.85	79	80	8.701.000.000,00	80.01	8.953.000.000,00	80.02	9.129.000.000,00	80.03	9.299.000.000,00	80.04	9.576.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					765.000.000,00		825.000.000,00		895.000.000,00		950.000.000,00		1.005.000.000,00	
Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan IKD (%)	13.45	14	15	765.000.000,00	16	825.000.000,00	17	895.000.000,00	18	950.000.000,00	19	1.005.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Penerbitan KIA (%)	30,02	33	35		40		45		50		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penerbitan KK (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan penerbitan KTP-El (%)	99.44	99.49	99.54		99.59		99.64		99.69		99.74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					490.000.000,00		520.000.000,00		555.000.000,00		590.000.000,00		625.000.000,00	
Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun (%)	93.53	95	96	490.000.000,00	97	520.000.000,00	98	555.000.000,00	99	590.000.000,00	99	625.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan penerbitan akta kematian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan penerbitan akta perceraian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan penerbitan akta perkawinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					430.000.000,00		470.000.000,00		510.000.000,00		590.000.000,00		590.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (%)	33.33	45.83	50	430.000.000,00	54.16	470.000.000,00	58.83	510.000.000,00	62.50	590.000.000,00	62.50	590.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan (%)	100	100	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	170.000.000,00	100	180.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TOTAL KESELURUHAN					10.546.000.000,00		10.928.000.000,00		11.249.000.000,00		11.599.000.000,00		11.976.000.000,00	

4.3 Pendanaan Indikatif

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada suatu program pada masing-masing kegiatan di unit kerja. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indicator kinerja pada masing-masing kegiatan per program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebutuhan anggaran untuk mendanai Program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10.546.000.000,00		10.928.000.000,00		11.249.000.000,00		11.599.000.000,00		11.976.000.000,00		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.701.000.000,00		8.953.000.000,00		9.129.000.000,00		9.299.000.000,00		9.576.000.000,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	78,85	80	8.701.000.000,00	80,01	8.953.000.000,00	80,02	9.129.000.000,00	80,03	9.299.000.000,00	80,04	9.576.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000.000,00		42.000.000,00		55.000.000,00		62.000.000,00		69.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	35.000.000,00	4	42.000.000,00	4	55.000.000,00	4	62.000.000,00	4	69.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	5.000.000,00	3	6.000.000,00	3	7.000.000,00	3	8.000.000,00	3	9.000.000,00		
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	5.000.000,00	2	6.000.000,00	2	8.000.000,00	2	9.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	5.000.000,00	2	6.000.000,00	2	8.000.000,00	2	9.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	5.000.000,00	2	6.000.000,00	2	8.000.000,00	2	9.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.12.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	2	5.000.000,00	2	6.000.000,00	2	8.000.000,00	2	9.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	5.000.000,00	3	6.000.000,00	3	8.000.000,00	3	9.000.000,00	3	10.000.000,00		
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	5.000.000,00	4	6.000.000,00	4	8.000.000,00	4	9.000.000,00	4	10.000.000,00		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.110.000.000,00		4.110.000.000,00		4.110.000.000,00		4.110.000.000,00		4.110.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	28	4.100.000.000,00	28	4.100.000.000,00	28	4.100.000.000,00	28	4.100.000.000,00	28	4.100.000.000,00		
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.100.000.000,00		4.100.000.000,00		4.100.000.000,00		4.100.000.000,00		4.100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	28	4.100.000.000,00	28	4.100.000.000,00	28	4.100.000.000,00	28	4.100.000.000,00	28	4.100.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	4		4		4		4		4			
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				160.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		215.000.000,00		245.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	160.000.000,00	1	180.000.000,00	1	200.000.000,00	1	215.000.000,00	1	245.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	26		26		26		26		26			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	300		300		300		300		300			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	7		8		9		10		11			
2.12.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	26	30.000.000,00	26	30.000.000,00	26	30.000.000,00	26	35.000.000,00	26	45.000.000,00		
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	300	30.000.000,00	300	40.000.000,00	300	50.000.000,00	300	50.000.000,00	300	60.000.000,00		
2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	7	70.000.000,00	8	80.000.000,00	9	90.000.000,00	10	100.000.000,00	11	110.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.772.000.000,00		1.890.000.000,00		2.007.000.000,00		2.122.000.000,00		2.231.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	26	1	1.647.000.000,00	1	1.755.000.000,00	1	1.861.000.000,00	1	1.965.000.000,00	1	2.071.000.000,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	3		3		3		3		3			
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	26	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	15.000.000,00	1	16.000.000,00	1	17.000.000,00		
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.600.000.000,00		1.700.000.000,00		1.800.000.000,00		1.900.000.000,00		2.000.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	1.600.000.000,00	5	1.700.000.000,00	5	1.800.000.000,00	5	1.900.000.000,00	5	2.000.000.000,00		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	2	10.000.000,00	2	16.000.000,00	2	16.000.000,00	2	17.000.000,00	2	17.000.000,00		
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00		
2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	125.000.000,00	4	135.000.000,00	4	146.000.000,00	4	157.000.000,00	4	160.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	6.000.000,00	4	7.000.000,00	4	10.000.000,00		
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	120.000.000,00	4	130.000.000,00	4	140.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.334.000.000,00		1.429.000.000,00		1.444.000.000,00		1.466.000.000,00		1.585.000.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	2	1.334.000.000,00	2	1.429.000.000,00	2	1.444.000.000,00	2	1.466.000.000,00	2	1.585.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	34	15		15		15		15		15			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	20		20		20		20		20			
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	34	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00		
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.168.000.000,00		1.263.000.000,00		1.278.000.000,00		1.300.000.000,00		1.419.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	20	1.168.000.000,00	20	1.263.000.000,00	20	1.278.000.000,00	20	1.300.000.000,00	20	1.419.000.000,00		
2.12.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	2	16.000.000,00	2	16.000.000,00	2	16.000.000,00	2	16.000.000,00	2	16.000.000,00		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				760.000.000,00		771.000.000,00		782.000.000,00		792.000.000,00		803.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	760.000.000,00	4	771.000.000,00	4	782.000.000,00	4	792.000.000,00	4	803.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	13.000.000,00		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				600.000.000,00		610.000.000,00		620.000.000,00		630.000.000,00		640.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	600.000.000,00	12	610.000.000,00	12	620.000.000,00	12	630.000.000,00	12	640.000.000,00		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				530.000.000,00		531.000.000,00		531.000.000,00		532.000.000,00		533.000.000,00		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	10	530.000.000,00	10	531.000.000,00	10	531.000.000,00	10	532.000.000,00	10	533.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	20		25		25		25		25			
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00		
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00		
2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				15.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	10	15.000.000,00	10	16.000.000,00	10	16.000.000,00	10	17.000.000,00	10	18.000.000,00		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	20	150.000.000,00	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00		
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				765.000.000,00		825.000.000,00		895.000.000,00		950.000.000,00		1.005.000.000,00		
Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Cakupan Penerbitan KIA (%)	30,02	35	765.000.000,00	40	825.000.000,00	45	895.000.000,00	50	950.000.000,00	55	1.005.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Cakupan kepemilikan IKD (%)	13,45	15		16		17		18		19			
	Cakupan penerbitan KTP-El (%)	99,44	99,54		99,59		99,64		99,69		99,74			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penerbitan KK (%)	100	100		100		100		100		100			
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				560.000.000,00		590.000.000,00		620.000.000,00		650.000.000,00		680.000.000,00		
Meningkatkan kemudahan akses layanan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	-	4	560.000.000,00	4	590.000.000,00	4	620.000.000,00	4	650.000.000,00	4	680.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	20	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	-	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	20	4		4		4		4		4			
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	20	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00		
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	-	4	30.000.000,00	4	40.000.000,00	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00		
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	20	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00		
2.12.02.2.01.0008 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	-	4	30.000.000,00	4	40.000.000,00	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				140.000.000,00		165.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		
Meningkatkan kemudahan akses layanan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	4	140.000.000,00	4	165.000.000,00	4	200.000.000,00	4	220.000.000,00	4	240.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	20	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	4		4		4		4		4			
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	4	30.000.000,00	4	40.000.000,00	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				90.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	20	4	90.000.000,00	4	100.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00		
2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	4	20.000.000,00	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	40.000.000,00	4	50.000.000,00		
2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Meningkatkan kemudahan akses layanan	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	45	65.000.000,00	4	70.000.000,00	4	75.000.000,00	4	80.000.000,00	4	85.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan)	20	4		4		4		4		4			
2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan)	20	4	15.000.000,00	4	20.000.000,00	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	35.000.000,00		
2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	45	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				490.000.000,00		520.000.000,00		555.000.000,00		590.000.000,00		625.000.000,00		
Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Cakupan penerbitan akta kematian (%)	100	100	490.000.000,00	100	520.000.000,00	100	555.000.000,00	100	590.000.000,00	100	625.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Cakupan penerbitan akta perkawinan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Cakupan penerbitan akta perceraian (%)	100	100		100		100		100		100			
	Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun (%)	93,53	96		97		98		99		99			
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				380.000.000,00		410.000.000,00		440.000.000,00		470.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatkan kemudahan akses layanan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	304	2	380.000.000,00	2	410.000.000,00	2	440.000.000,00	2	470.000.000,00	2	500.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	20	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	304	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00		
2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	20	4	310.000.000,00	4	320.000.000,00	4	330.000.000,00	4	340.000.000,00	4	350.000.000,00		
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	4	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00	4	80.000.000,00	4	90.000.000,00		
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				110.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		
Meningkatkan kemudahan akses layanan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	-	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00	2	115.000.000,00	2	120.000.000,00	2	125.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	4	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00		
2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	-	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				430.000.000,00		470.000.000,00		510.000.000,00		590.000.000,00		590.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (%)	33,33	50	430.000.000,00	54,16	470.000.000,00	58,83	510.000.000,00	62,50	590.000.000,00	62,50	590.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				40.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Meningkatnya pengajuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	10	10	40.000.000,00	11	60.000.000,00	12	80.000.000,00	13	100.000.000,00	14	120.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	-	2		2		2		2		2			
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	-	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	10	10	20.000.000,00	11	30.000.000,00	12	40.000.000,00	13	50.000.000,00	14	60.000.000,00		
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				370.000.000,00		390.000.000,00		405.000.000,00		460.000.000,00		435.000.000,00		
Meningkatnya pengajuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	-	2	370.000.000,00	2	390.000.000,00	2	405.000.000,00	2	460.000.000,00	2	435.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	20	2		2		2		2		2			
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				350.000.000,00		370.000.000,00		380.000.000,00		430.000.000,00		400.000.000,00		
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	20	2	350.000.000,00	2	370.000.000,00	2	380.000.000,00	2	430.000.000,00	2	400.000.000,00		
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	-	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya pengajuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	-	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	-	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan (%)	100	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	170.000.000,00	100	180.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		
Tersusunya profil kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	75	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	170.000.000,00	2	180.000.000,00		
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	75	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	170.000.000,00	2	180.000.000,00		

TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Unggulan Bupati ke 2: Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
			2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
			2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	
2.	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Program Unggulan Bupati ke 2: Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	
3.	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Program unggulan Bupati ke 2: Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
			2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
			2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
			2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
4.	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	Program Unggulan Bupati ke 2: Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
			2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Untuk lebih memantapkan arah pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk. Target indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah yang terdiri atas:

1) **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah, mencerminkan pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta mengukur dampak dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan;
2) **Indikator Kineruja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan pencapaiam penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci;
3) **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan daerah.

Penetapan IKD, IKU dan IKK serta penetuan target pencapaiannya dalam dokumen Renstra sangat penting karena menggambarkan tujuan pembangunan jangka menengah daerah yang identik dengan gambaran kesejahteraan masyarakat. Penetapan target IKD, IKU dan IKK didasarkan atas evaluasi terhadap keberhasilan/capaian pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) 2024. Pada sisi lain target IKD, IKU dan IKK merupakan ukuran yang dipergunakan untuk pengendalian dan evaluasi proses pembangunan

ke depan, untuk mengetahui apakah sudah berada di arah yang tepat sebagaimana dimaksud pada substansi Visi dan Misi RPJMD.

lndikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sejumlah 4 Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 -2029 dalam Tabel sebagai berikut:

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1.	Cakupan kepemilikan KTP-El	%	99,44	99,49	99,54	99,59	99,64	99,69	99,74	
2.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	%	93,53	95	96	97	98	99	99	
3	Cakupan kepemilikan KIA	%	30,02	33	35	40	45	50	55	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	90,97	91	91,3	91,5	91,7	92	92	
5.	Cakupan kepemilikan KK	%	100	100	100	100	100	100	100	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1.	Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun	positif	%	93.53	95	96	97	98	99	99	
2.	Cakupan penerbitan akta kematian	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Cakupan penerbitan akta perceraian	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Cakupan penerbitan akta perkawinan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Cakupan kepemilikan IKD	positif	%	13.45	14	15	16	17	18	19	
6.	Cakupan penerbitan KK	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Cakupan Penerbitan KTP	positif	%	99.44	99.49	99.54	99.59	99.64	99.69	99.74	
8.	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Perjanjian Kerjasama	positif	%	33.33	45.83	50	54.16	58.83	62.50	62.50	
9.	Cakupan Penerbitan KIA	positif	%	30.02	33	35	40	45	50	55	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001